

**PARTISIPASI POLITIK KELOMPOK MUSIK HIP-HOP
(STUDI KASUS KELOMPOK MUSIK ANIKONIK DI KOTA
MAKASSAR)**

SKRIPSI

MUH. RAMDHAN SYAHRONI

E411 16 007



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

**POLITICAL PARTICIPATION OF HIP-HOP MUSIC GROUPS
(CASE STUDY OF ANIKONIK MUSIC GROUPS IN
MAKASSAR CITY)**

THESIS

MUH. RAMDHAN SYAHRONI

E411 16 007



**DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR CITY**

2022

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin

Oleh:

NAMA : MUHL. RAMDHAN SYAHRONI

NIM : E411 16 007

**JUDUL : PARTISIPASI POLITIK KELOMPOK MUSIK HIP-HOP
(STUDI KASUS KELOMPOK MUSIK ANIKONIK DI KOTA
MAKASSAR)**

Pada,

Hari/Tanggal: Jumat, 12 Agustus 2022

Tempat: Ruang Ujian Departemen Sosiologi FISIP Unhas

TIM EVALUASI SKRIPSI

Ketua : Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si

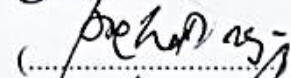
Sekretaris : Dr. Buhari Mengge, M.A

Anggota : Dr. Muhammad Sabiq, L.c., M.Si

Sultan, S.Sos., M.Si



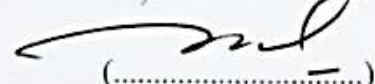
(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUH. RAMDHAN SYAHRONI

NIM : E411 16 007

JENJANG : STRATA 1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan Saya yang berjudul:

PARTISIPASI POLITIK KELOMPOK MUSIK HIP-HOP (STUDI KASUS KELOMPOK MUSIK ANIKONIK DI KOTA MAKASSAR)

Adalah karya tulisan Saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang Saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan Saya tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2022

Yang menyatakan



Muh. Ramdhan Syahrani

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Partisipasi Politik Kelompok Musik Hip-Hop (Studi Kasus
Kelompok Musik Anikonik di Kota Makassar)


Nama : Muh. Ramdhan Syahrani

NIM : E41116007

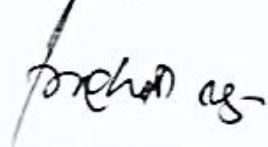
Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada Jumat, 12 Agustus 2022,

Menyetujui,

Pembimbing I

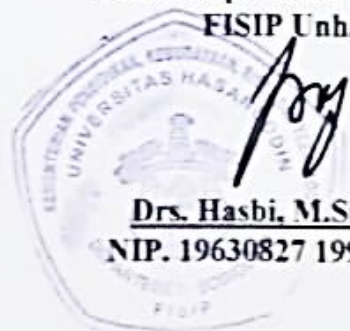

Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si
NIP. 19690130 200804 1 001

Pembimbing II


Dr. Buhari Mengge, M.A
NIP. 19690529 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi
FISIP Unhas


Dr. Hasbi, M.Si., Ph.D
NIP. 19630827 19911 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah Arrahman Arrahim.

Banyak pengalaman buruk sekaligus baik yang Saya rasakan selama mengenyam status mahasiswa di kampus merahku tercinta, Universitas Hasanuddin. Kedua hal tersebut dalam pengalaman Saya tersebut menjadi episode spesial dalam hidup ini yang jika dipikirkan, semua rasa itu tidak akan terulang lagi kemudian hari. Tidak berlebihan jika Saya menyematkan kalimat bahwa dunia kampus adalah menyoal: buku, pesta dan cinta, selayak Soe Hok Gie katakan semasa hidupnya. Oleh karena itu kurayakanlah kehidupanku di kampus.

Buntut dari romansa kehidupan kampusku adalah bahwa Saya harus sadar jika menjadi mahasiswa tidaklah abadi. Kecewa? Tentu! Banyak hal yang menjadi alasan sehingga menjadi demikian. Tentu aturan kampus dan tuntutan keluarga. Meskipun kecewa, Saya harus sadar akan hal itu.

Sebagai pengormatan terhadap segala hal yang Saya alami baik dan buruknya episode kehidupan berkampus ini, kuucapkan terima kasih untuk kalian dan tidak lupa juga sebagai tanda pengorhamatan tersebut, Saya persembahkan skripsi ini kepada kalian yang kemudian membaca ini. Setidaknya melalui karya ini semoga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kampus adalah tempat di mana kita bisa memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin, *make it possible. Ja Sagen.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebagai awalan Saya ingin mengucapkan rasa bahagia sekaligus sesal karena pada dasarnya menyampaikan kalimat dalam “Kata Pengantar” ini adalah hal tersendiri dalam masa akhir berstatus mahasiswa. Berstatus mahasiswa dalam kurun waktu enam tahun ini serasa tidak ingin Saya akhiri karena Saya harus jujur, berstatus mahasiswa adalah hal membahagiakan, tetapi adanya tuntutan di luar status yang menjadi alasan mengapa perlu mengakhiri petualangan ini. Sesal? Memang demikian, mungkin yang membaca tulisan ini merasakan hal yang sama? Sehingga tidak berlebihan kalau Saya mengatakan ini adalah rasa bahagia maupun sesal. Anda perlu paham bahwa Saya telah berlapang dada untuk melepas status mahasiswa.

Oleh karena itu, sebagai kewajiban akademik terakhir, Saya merilis skripsi ini dengan judul: Partisipasi Politik Kelompok Musik Hip-Hop. Perlu diketahui, pergulatan ide tentang skripsi ini bersumber dari pengalaman-pengalaman yang Saya alami selama berstatus mahasiswa, sehingga tidak berlebihan jika Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pembimbing skripsi Saya yakni Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si., dengan Dr. Buhari Mengge, M.A. yang sejauh ini telah bersabar hati dan memberikan kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga tidak lupa Saya sampaikan kepada:

1. Dr. Muh. Sabiq, L.c., M.Si dengan Sultan, S.Sos., M.Si selaku penguji skripsi.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Kedua orang tua Saya, Mursalim dan Rosmawati, serta kedua adik Saya, Iqbal dan Amel, serta tidak terlupakan keluarga Rosniati dan Rostati.
6. Anggota dan alumni Kemasos FISIP Unhas begitupun di lingkup Kema FISIP Unhas.
7. Widya Winda Sari sebagai *she is the one* dalam hidup. Dia telah banyak membantu Saya untuk pencarian referensi dan mengarahkan Saya untuk mengetahui seluk-beluk pengadministrasian di fakultas.
8. Keluarga kecilku Socrates 2016 yang tetap abadi.
9. Kepada para informan penelitian ini, yaitu Amok, Metz, Goza, Oci dan Ade.

Makassar, 23 Agustus 2022

Muh. Ramdhan Syahroni

ABSTRAK

Partisipasi Politik Kelompok Musik Hip-Hop (Studi Kasus Kelompok Musik Anikonik di Kota Makassar)

Muh. Ramdhan Syahroni, Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si, Dr. Buhari Mengge, M.A

Partisipasi politik adalah upaya warga negara secara individual maupun kelompok terlibat dalam proses politik yang bertujuan untuk memengaruhi sebuah kebijakan dari pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, melalui penelitian ini, memosisikan Anikonik sebagai kelompok musik hip-hop di Kota Makassar dilihat berdasarkan konteks partisipasi politik yang di mana memuat tentang motif apa yang melatarbelakangi mereka serta bentuk partisipasi politik yang dilakukan, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami motif serta bentuk partisipasi politik Anikonik. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan dasar penelitian studi kasus. Dalam memperoleh informan menggunakan teknik *purposive sampling* lalu menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi dalam memperoleh data dari informan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa motif berpartisipasi politik Anikonik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dalam hal ini adalah latar belakang personil sebagai bagian komunitas *punk* serta kesamaan minat mereka terhadap hip-hop yang memiliki konteks sejarah akan isu sosial-politik sehingga mereka membentuk Anikonik dengan musik bergenre hip-hop dengan tujuan untuk memperdengarkan lagu mereka yang bertema sosial-politik kepada khalayak. Mencapai tujuan tersebut, mereka berpartisipasi politik dalam beberapa bentuk, baik secara konvensional maupun nonkonvensional. Bentuk konvensional yang dilakukan adalah kampanye atau dalam hal ini musik sebagai media menyampaikan kritik mereka kepada pemerintah serta bentuk nonkonvensional dari Anikonik adalah keterlibatan personil Anikonik dalam gerakan solidaritas Warga Bara-Barayya menolak pengusuran dan kolektif-kolektif ekonomi mandiri di Kolong Tol Jln. Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Hip-Hop, Anikonik

ABSTRACT

Political Participation of Hip-Hop Music Groups (Case Study of Anikonik Music Groups in Makassar City)

Muh. Ramdhan Syahroni, Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si, Dr. Buhari Mengge, M.A

Political participation is the effort of citizens individually or in groups to be involved in a political process that aims to influence a government policy. Departing from this, through this research, positioning Anikonik as a hip-hop music group in Makassar City is seen based on the context of political participation which includes what the motives are behind them and the form of political participation carried out, so the purpose of this study is to understand the motives and forms of Anikonik's political participation. The research uses qualitative research methods with descriptive research types and case study research bases. In obtaining informants using purposive sampling technique and then using in-depth interviews and observations in obtaining data from informants. The results of this study illustrate that the motives for participating in Anikonik politics are influenced by several factors, in this case the personnel's background as part of the punk community and their common interest in hip-hop which has a historical context on socio-political issues so that they formed Anikonik with hip genre music. -hop with the aim of presenting their songs with socio-political themes to the public. To achieve this goal, they participate in politics in several forms, both conventionally and unconventionally. The conventional form that is carried out is campaigning or in this case music as a medium for conveying brand criticism to the government and the unconventional form of Anikonik is the involvement of Anikonic personnel in the solidarity movement of the Bara-Barayya Citizens rejecting evictions and independent economic collectives at Kolong Tol Jln. Andi Pangerang Pettarani Makassar City.

Keywords: Political Participation, Hip-Hop, Anikonik

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI... Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.A. Latar Belakang.....	1
1.B. Rumusan Masalah.....	4
1.C. Tujuan Penelitian	5
1.D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	6
2.A. Motif Berpartisipasi Politik	13
2.B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	15

2.C. Teori Tindakan Sosial.....	20
2.D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	22
2.E. Kerangka Konseptual.....	23
BAB III: METODE PENELITIAN	27
3.A. Pendekatan dan Strategi Penelitian	27
3.B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.C. Tipe dan Dasar Penelitian.....	29
3.D. Teknik Penentuan Informan	30
3.E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV: GAMBARAN UMUM ANIKONIK	35
4.A. Sejarah Munculnya Hip-Hop.....	35
4.B. Empat Unsur Dasar Hip-Hop.....	36
4.C. Perkembangan Musik Hip-Hop di Indonesia	39
4.D. Profil Anikonik.....	41
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
BAB VI: PENUTUP	60
6.A. Kesimpulan.....	60
6.B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

A. Buku	62
B. Jurnal.....	62
C. Website	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi dan Indikator Partisipasi Politik	10
Tabel 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik versi Gabriel Almond	16
Tabel 3. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	23
Tabel 4. Waktu Penelitian	28
Tabel 5. Lokasi Penelitian	28
Tabel 6. Faktor yang Memengaruhi Motif Berpartisipasi Politik Anikonik . . .	48
Tabel 7. Motif dari Tindakan Sosial dalam Berpartisipasi Politik.....	51
Tabel 8. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang

Partisipasi politik secara sederhana didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat (individu/kelompok) pada praktik politik elektoral (pemilihan umum), dengan menggunakan hak suara dalam memilih calon pejabat politik. Selain politik elektoral, partisipasi politik juga pada umumnya dipahami sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Merujuk pada catatan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) tentang praktik politik elektoral sepanjang tahun 2019 dengan judul: *Catatan Awal Tahun 2019-2020: Demokrasi dalam Belenggu Pragmatisme Elite* yang menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat selama pemilu tahun 2019 mencapai angka 81% dalam hal menggunakan hak suara mereka dan momen pemilu pada waktu itu menandakan masih adanya kepercayaan masyarakat dalam berpolitik di tengah gempuran narasi elitisme partai, hoaks, isu SARA atau kelompok marginal maupun kontradiksi ideologi politik yang dianggap berbahaya (Perludem, 2020). Terlepas dari adanya kepercayaan terhadap politik di tengah gempuran narasi di atas, Perludem menegaskan dari angka 81% tersebut, masyarakat Indonesia masih memahami partisipasi politik sebatas politik electoral.

Jika dilihat secara luas, partisipasi politik adalah fenomena sosial yang terjadi di keseharian kita. Di lain sisi juga menjadi sebuah konsep dalam kajian

ilmu sosial, khususnya sosiologi politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2015).

Peran masyarakat dalam berpartisipasi politik sangat penting. Upaya berpartisipasi politik dimaknai sebagai upaya kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diatur, kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing (Masambe, 2017:3).

Sebagai bagian historis peradaban manusia, musik adalah hal yang sulit dilepaskan dari kehidupan manusia. Musik dan kehidupan manusia adalah hal yang dialektis, saling memengaruhi satu sama lain. Musik adalah elemen seni dalam menghasilkan suara yang indah, baik vokal maupun instrumental secara terstruktur sehingga membentuk satu-kesatuan dan memberikan kesan-pesan bagi para pendengarnya. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Musik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi estetis dan fungsi sosial. Fungsi estetis dari musik dilihat perihal betapa indahnyanya alunan suara berbagai instrumen musik begitupun suara vokal yang mampu memanjakan telinga pendengar. Selain itu, musik memiliki fungsi sosial, dalam hal ini menurut Hadi, musik menjadi bentuk kritik (Setyobudi, 2017:103). Fungsi sosial musik tersebut, difungsikan bagi

musisi dalam mengkritik kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya, sebagai contoh: N.W.A. dalam lagunya yang berjudul: *Fuck the Police*.

Fungsi estetis dan sosial musik dalam perkembangan zaman, kian memunculkan hal baru, sehingga musik pun juga mengalami banyak perubahan (Resmadi, 2018). Perkembangannya bisa dilihat dari beragamnya jenis atau genre yang tersaji untuk didengar oleh banyak orang melalui media yang tersedia, seperti pada tahun 1960-an yang identik dengan era berkembangnya genre *psychedelic rock*. Perlahan pada tahun berikutnya, genre *punk* muncul sebagai kritik terhadap subkultur hippies dan menemukan perkembangannya pada tahun 1970-1980-an. Bahkan hip-hop juga berkembang pada periode tersebut yang dipopulerkan oleh *rapper* maupun DJ seperti: Public Enemy, N.W.A., Run-DMC, Digital Underground dan lainnya.

Hip-hop dikenal sebagai genre musik yang awalnya berkembang di AS. Semuanya bermula di South Bronx, New York, AS yang di mana daerah tersebut terkenal dengan kelompok minoritas kulit hitam (negro). Bagi mereka, musik menjadi bentuk 'pelampiasan' kelompok kulit hitam atas kondisi timpang yang mereka alami. Mereka bermusik (*rap*) begitu cepatnya tempo dalam bernyanyi. Melakukan *rap* memiliki alasan tersendiri sebagai bentuk pelampiasan kemarahan. Menurut Chang, hip-hop menjadi genre alternatif dalam skena musik. Dalam lirik musik hip-hop ini menceritakan pengalaman hidup yang mereka alami dan protes terhadap perilaku yang semena-mena yang dilakukan majikannya (Kalisu, 2017).

Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang menjadi tempat dari musik hip-hop tumbuh. Terdapat salah satu kelompok musik

hip-hop, yakni Anikonik. Anikonik adalah kelompok musik hip-hop yang berlokus di Kota Makassar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai partisipasi politik sebagai kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif, begitupun dengan musik yang tidak hanya memiliki fungsi estetis, tetapi fungsi sosial. Merujuk pada partisipasi politik dari Huntington dengan fungsi sosial dari musik, Dalam penelitian ini, penulis berupaya memosisikan Anikonik sebagai bagian dari partisipan politik. Dengan ciri sebagai kelompok musik, penelitian ini melihat beberapa hal menjadi fokus utama dalam penelitian sehingga penulis mengangkat judul, yaitu: **Partisipasi Politik Kelompok Musik Hip-Hop (Studi Kasus Anikonik di Kota Makassar).**

1.B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka Peneliti perlu memfokuskan pada beberapa masalah saja. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana motif kelompok musik Anikonik dalam berpartisipasi politik?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik kelompok musik Anikonik?

1.C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana motif kelompok musik Anikonik dalam berpartisipasi politik,
2. Untuk memahami bentuk partisipasi politik kelompok musik Anikonik.

1.D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini yang akan berujung pada sebuah hasil akhir, dapat menjadi sumber bacaan sekaligus upaya mengembangkan musik menjadi salah satu topik kajian dalam diskursus sosiologi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi seniman/musisi yang ingin mengembangkan segala unsur dalam produksi karya musik yang berdasar pada upaya kritik terhadap sesuatu (sosial, politik, agama, budaya, dan lain-lain).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Secara umum partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Rakyat memanfaatkan kedaulatannya dalam demokrasi adalah dengan berpartisipasi politik. Partisipasi politik sendiri merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (Subekti, 2014).

Partisipasi politik masyarakat merupakan perangkat penting karena dalam berdemokrasi, partisipasi politik diperlukan masyarakat karena masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki (Gatara dan Said, 2007). Azas dasar sebuah negara yang demokratis, yakni kedaulatan rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pemilihan umum (pemilu) misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Dengan kata lain, kondisi politik sebuah negara dipengaruhi oleh pilihan politik masyarakat. Tidak hanya itu, partisipasi politik

masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Terdapat beberapa definisi tentang partisipasi politik seperti yang di bawah ini:

Tokoh	Definisi	Indikator
Samuel P. Huntington	Partisipasi politik, kegiatan warga preman (<i>private citizen</i>) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	Berupa kegiatan, bukan sikap-sikap dan kepercayaan Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik Dilakukan warga negara preman (biasa)
Michael Rush & Philip Althoff	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik	Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik Memiliki tingkatan-

		tingkatan partisipasi
Herbert McClosky	Partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela (<i>voluntary</i>) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum	Berupa kegiatan-kegiatan sukarela Dilakukan warga negara Warga negara terlibat dalam proses politik
Kevin R. Hardwic	Partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-	Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah Terdapat usaha warga negara untuk

	pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut	memengaruhi pejabat publik
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>)	Berupa kegiatan individu atau kelompok Bertujuan ikut secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sesuai dengan	Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik Dilakukan oleh warga negara biasa

	istilah partisipasi, “politik” berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik	
--	---	--

Tabel 1. Definisi dan Indikator Partisipasi Politik

Berdasarkan beberapa definisi di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah:

1. Sebagai kegiatan-kegiatan nyata. Partisipasi politik yang termasuk kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi;
2. Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakkan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang pihak pemerintah, desakan, manipulasi. Jika pemicunya adalah pihak lain, kecenderungannya bukan partisipasi politik, melainkan mobilisasi politik. Jika pemicunya kesadaran diri, hal tersebut merupakan partisipasi dalam pengertian otonom;

3. Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat, kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik;
4. Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/atau mencari jabatan politik. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian, orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan dan;
5. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi, yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling luas cakupannya sampai yang paling sempit (Gatara da Said, 2007:91-92).

Partisipasi politik juga secara spesifik didefinisikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson sebagai kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, teorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2015). Definisi yang telah dijelaskan tersebut dapat dibatasi beberapa hal, yaitu:

1. Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, keefektifan politik, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik;
2. Partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini didasarkan pada pejabat-pejabat yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa;
3. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik;
4. Partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal dan;
5. Partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan ke pemerintah (Suriyanto, 2015:14-15).

2.A. Motif Berpartisipasi Politik

Pada dasarnya, yang membuat seseorang berpartisipasi politik dikarenakan adanya dorongan atau motif. Motif menurut Murray dalam Suarni (2011) adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan (*need*) hidup seseorang dan untuk memenuhi kebutuhannya seseorang melakukan sesuatu atau bertindak. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup, motif tidak sebatas faktor lahiriah seseorang yang sejak lahir dimiliki, tetapi motif juga dibentuk lewat pengaruh lingkungan sosial seseorang tersebut berada, sehingga kebutuhan seseorang itu dinamis atau dapat berubah setiap saat.

Dalam konteks berpolitik, seseorang berpartisipasi politik dikarenakan adanya kebutuhan seseorang atau warga. Berpartisipasi politik adalah sarana bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk kebijakan politik. Politik dengan kata lain adalah dimensi sosial bagi setiap orang yang memiliki motif agar kebutuhannya terpenuhi, sebagai contoh: sebuah kelompok musik menuntut pemerintah agar lebih pro terhadap korban penggusuran kendati korban tersebut menuntut hal yang sama kepada pemerintah. Dengan kata lain, politik adalah sarana bagi seseorang untuk mengartikulasikan motif agar kebutuhan yang beragam tersebut terwadahi. Pemerintah menurut Mas'ood dan MacAndreas, menjadi titik berat atau pihak berwenang dalam memenuhi kebutuhan warganya dan di sisi lain, warga juga harus berperan aktif berpartisipasi politik agar kebutuhan mereka dipenuhi oleh pemerintah (Dwitama *et al*, 2022).

Motif berpartisipasi politik muncul disebabkan oleh beragam faktor, seperti yang dikemukakan oleh Weimer dalam Suriyanto (2018), yang di mana

terdapat lima faktor yang memengaruhi seseorang atau kelompok berpartisipasi politik:

1. Modernisasi

Modernisasi di segala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru, seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta memengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat memengaruhi nasibnya sendiri;

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik;

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa

Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egalitarianisme mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi massa membantu menyebarkan seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit-banyaknya berimplikasi pada tuntutan rakyat;

4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu kebebasan pers dan;

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam memengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

2.B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik sangat beragam jika dipandang dalam konteks bentuk aksi . Mengacu pada Gabriel Almond dalam Budiardjo (2015), partisipasi politik memiliki dua bentuk aksi, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern dan;
2. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (*violence*) dan revolusioner.

Konvensional	Non-Konvensional
---------------------	-------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Suara - Diskusi politik - Kegiatan kampanye - Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan - Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan petisi - Berdemonstrasi/unjuk rasa - Konfrontasi - Mogok - Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman dan pembakaran) - Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan) - Perang gerilya
---	--

Tabel 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik versi Gabriel Almond

Beragamnya bentuk partisipasi politik seperti yang disebutkan di atas tidak lepas dari dinamika politik sebuah negara, antara warga dengan pemerintahnya. Partisipasi politik warga negara tentu memiliki tujuan untuk memengaruhi kebijakan dari pemerintah ke mereka, dengan mengartikulasikan kepentingan politiknya lalu dimanifestasikan lewat beragam bentuk aksi.

Perkembangan fenomena bentuk partisipasi politik dapat dilihat melalui munculnya istilah *New Social Movement* (NSM). Fenomena partisipasi politik dan kaitannya dengan NSM menjadi topik khusus dalam sosiologi politik, dilihat dari

konteks negara-negara berkembang. Pada awalnya, kajian tentang partisipasi politik memfokuskan diri pada institusi politik, dalam hal ini adalah partai politik, sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa warga negara dengan kepentingan yang sama.

Bergulirnya waktu, banyak warga negara secara individu maupun dalam bentuk kelompok berupaya untuk terlibat atau berpartisipasi politik agar kepentingannya diakomodir oleh pemerintah. Fenomena ini lahir pada masa masyarakat pascaindustri atau *post-industrial* dan pada akhirnya fenomena tersebut dilabeli sebagai bentuk gerakan sosial baru atau NSM (Budiardjo, 2015).

Menurut Budiardjo (2015), terdapat catatan penting tentang mengapa NSM bisa hadir. Salah satu faktornya adalah adanya kekecewaan terhadap kinerja partai politik yang cenderung memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*). Pemusatan pada satu masalah tertentu dari partai politik menjadi poin kritik dari individu atau kelompok kepentingan lainnya dengan dalih ingin berpartisipasi politik langsung dengan harapan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik pemerintah agar kepentingan mereka diwadahi.

Sentralisasi kepentingan politik melalui partai politik yang dinamakan *Old Social Movement* (OSM) beralih ke NSM, menjadi titik baru dalam bagaimana warga negara dapat berpartisipasi politik secara luas dan melakukannya dalam berbagai bentuk. Tahun 1960-an menjadi dekade khusus dalam sejarah partisipasi politik sekaligus awal mula ide NSM muncul, hal tersebut ditandai dengan munculnya pergolakan di berbagai negara Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet dengan ambisi mengkomunikasikan negara-negara

Eropa Timur (baca: Perang Dingin). Kekecawaan terhadap partai politik negara yang mendominasi kepentingan, memicu partisipasi politik warga untuk mengkritik bahkan menggulingkan pemerintah agar tercipta tatanan demokratis yang di mana warga negara dapat secara bebas berpartisipasi politik dengan beragam kepentingan yang dimilikinya (Budiardjo, 2015).

NSM muncul dengan kepentingan beragam yang diperjuangkan oleh warga dalam berpolitik. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Nur Rohim (2017) bahwa terdapat gelombang deparpolisasi dari warga negara yang diakibatkan oleh adanya perubahan persepsi dan kurangnya rasa percaya mereka terhadap institusi partai politik sebagai corong dalam berpartisipasi dikarenakan adanya tindakan amoral dan inkonstitusional dari partai politik yang dulunya dianggap harapan, justru sebaliknya karena itu, warga negara berhak mengartikulasikan kepentingannya dengan berpartisipasi politik dalam beragam bentuk. Fenomena NSM memberikan pemahaman baru tentang partisipasi politik dapat muncul dengan beragam motif serta bentuk, contohnya: band asal Indonesia, Seringai mengampanyekan *#BlokirKominfo* sebagai bentuk kritik terhadap Kominfo yang memberlakukan kebijakan PSE terhadap pelaku internet.

Dari penjelasan di atas menurut Enrique Larana, Hank Johnston dan Joseph R. Gusfield dalam Budiardjo (2015: 385-386), NSM memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Basis NSM bersifat lintas kelas sosial. Latar belakang status sosial peserta tersebar (*diffuse social statutes*) seperti golongan muda, gender dan

mereka yang mempunyai perbedaan orientasi seksualitas (*gay* atau *lesbian*),

2. karakteristik sosial mereka sangat berbeda dari ciri gerakan buruh, maupun dengan konsepsi Marxis bahwa ideologi merupakan unsur yang memersatukan. Mereka menganut pluralisme dalam ide dan nilai, berorientasi pragmatis dan memperjuangkan partisipasi dalam proses membuat keputusan,

3. dalam kehidupan sehari-hari, NSM menumbuhkan dimensi identitas, baik NSM yang baru maupun yang sebelumnya lemah, sifatnya lebih memerhatikan masalah identitas daripada masalah bidang ekonomi. NSM mendasarkan diri atas suatu perangkat kepercayaan dan nilai yang menyangkut keyakinannya, bahwa ia termasuk suatu kelompok sosial yang berbeda, menyangkut citra mengenai diri sendiri dan menyangkut terbentuknya lambang-lambang baru mengenai kehidupan sehari-hari,

4. hubungan antara individu dan kolektivitas kabur. Gerakan-gerakan ini lebih sering dilaksanakan dengan kegiatan individual (*individual action*) dibanding melalui kelompok termobilisasi. Contoh: gerakan *hippies* merupakan contoh di mana unsur individual lebih dominan, sedangkan gerakan kaum homoseksual memperlihatkan campuran dari tindakan kolektif dan individual,

5. NSM lebih sering menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi seperti aborsi, antimerokok dan pengobatan alternatif. Pemikiran ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari,

6. taktik mobilisasi yang dipakai oleh NSM ialah melalui antikekerasan dan ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*), hal yang jauh berbeda dengan taktik-taktik OSM,
7. munculnya kelompok-kelompok NSM dipicu antara lain oleh timbulnya krisis kepercayaan terhadap sarana-sarana partisipasi politik, terutama perilaku partai massa tradisional,
8. berbeda dengan birokrasi dari partai-partai tradisional, kelompok-kelompok NSM cenderung tersegmentasi, tersebar luas tanpa fokus dan tidak tersentralistis.

2.C. Teori Tindakan Sosial

Akar dari teori tindakan sosial adalah paradigma definisi sosial. Prinsip rasionalitas manusia menurut Max Weber dijadikan landasan kuat terhadap paradigma tersebut, sehingga tindakan sosial adalah kenyataan sosial. Paradigma ini menekankan rasionalitas manusia yang merupakan landasan logis dan objektif, sehingga dari rasionalitas tersebut dapat diketahui sejauh manusia bertindak.

Menurut Weber tentang teori tindakan sosial didasarkan pada hubungan sosial terhubung dengan tujuan-tujuan manusia dalam melakukan tindakan, sehingga terdapat beberapa ciri pokok dalam tindakan sosial Weber:

1. Tindakan manusia bersifat subjektif yang berupa tindakan nyata;
2. Tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya;

3. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan dalam bentuk persetujuan diam-diam;
4. Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau beberapa individu, dan;
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain (Prastowo dalam Prahesti, 2021).

Ciri-ciri di atas menegaskan bahwa teori tindakan sosial menegaskan terdapat motif pada manusia dalam melakukan tindakannya, dilihat secara individual dan kolektifnya. Karena setiap tindakan disebabkan oleh motif dan memiliki makna dari tindakannya.

Tindakan sosial menurut Weber berorientasi pada motif individu dalam bertindak. Teori ini memahami perilaku individu maupun kelompok, masing-masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu, sehingga tindakan menurut Weber terklasifikasikan berdasarkan motif, yaitu:

1. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang di mana tindakan-tindakan sudah mengakar secara turun-temurun;
2. Tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional. Tindakan ini menyadarkan pada suatu pertimbangan manusia ketika menanggapi situasi eksternal dan menanggapi orang-orang lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan;

3. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional, diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan, dan;
4. Tindakan rasionalitas nilai merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Tindakan ini, aktor memiliki kendali lebih dalam menanggulangi tujuan akhir dan nilai-nilai yang merupakan tujuan yang satu-satunya harus dicapai (Ritzer, 2016).

2.D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Poin ini adalah menjelaskan beberapa hasil penelitian (skripsi) terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diangkat. Dua judul penelitian di bawah ini menjadi referensi dalam penyusunan judul.

No.	Nama/Institusi (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Milka Yuniastry Kalisu/S1 Program Studi Sastra Jepang FIB Universitas Hasanuddin	Perkembangan & <i>Self Image</i> dalam Musik Hip-Hop di Jepang	Metode penelitian kualitatif	Dalam hip-hop Jepang menggambarkan <i>self image</i> atau penggambaran diri penyanyi dengan mengekspresikan atau

	(2017)			mencurakannya didalam sebuah dengan nada musik yang cepat itulah <i>rap</i> .
2.	Budimansyah Parutta/S1 Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin Partisipasi Politik Pendengar Musik Keras (2019)	Partisipasi Politik Pendengar Musik Keras	Metode penelitian kualitatif	Pendengar musik keras menjadikan musik, khususnya pada bagian lirikal sebagai medium untuk merasakan permasalahan sosial-politik yang terjadi di sekitar. Musik pula, dianggap sebagai cara agar dapat menyampaikan permasalahan sosial-politik.

Tabel 3. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

2.E. Kerangka Konseptual

“Masa depan sebuah negara, sejahtera atau tidaknya ditentukan oleh partisipasi politik warganya”, kalimat tersebut setidaknya menjadi penanda

bahwa partisipasi politik adalah bagian penting sehingga sangat memengaruhi bagaimana kondisi politik sebuah negara.

Partisipasi politik warga negara menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengandaikan peran warga dalam upaya memengaruhi pembuatan kebijakan politik dari pemerintah (Budiardjo, 2015). Mengapa warga menjadi titik berat akan hal itu, dikarenakan pemerintah hanyalah hasil dari pilihan warga negara yang kemudian diberikan legitimasi dan legalitas untuk menyelenggarakan kebijakan politik.

Pemerintah secara tidak langsung harus memenuhi kebutuhan warganya. Atas dasar itu, untuk menjamin pemerintah berjalan sesuai koridornya, partisipasi politik warga yang berperan dalam mengontrol (*controlling*) kinerja dari pemerintah yang telah diberikan legitimasi dan legalitas dalam melaksanakan tugasnya.

Motif atau tujuan dari partisipasi politik pada dasarnya adalah pengingat bahwa kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat sehingga rakyat berhak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan kebijakan politik dari pemerintah. Tidak lepas dari itu, yang menyebabkan kondisi demikian dikarenakan adanya motif setiap orang dalam berpartisipasi.

Motif berpartisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Weimer dalam Surianto (2018), ada lima faktor yang memengaruhi motif seseorang, yaitu:

1. Modernisasi;

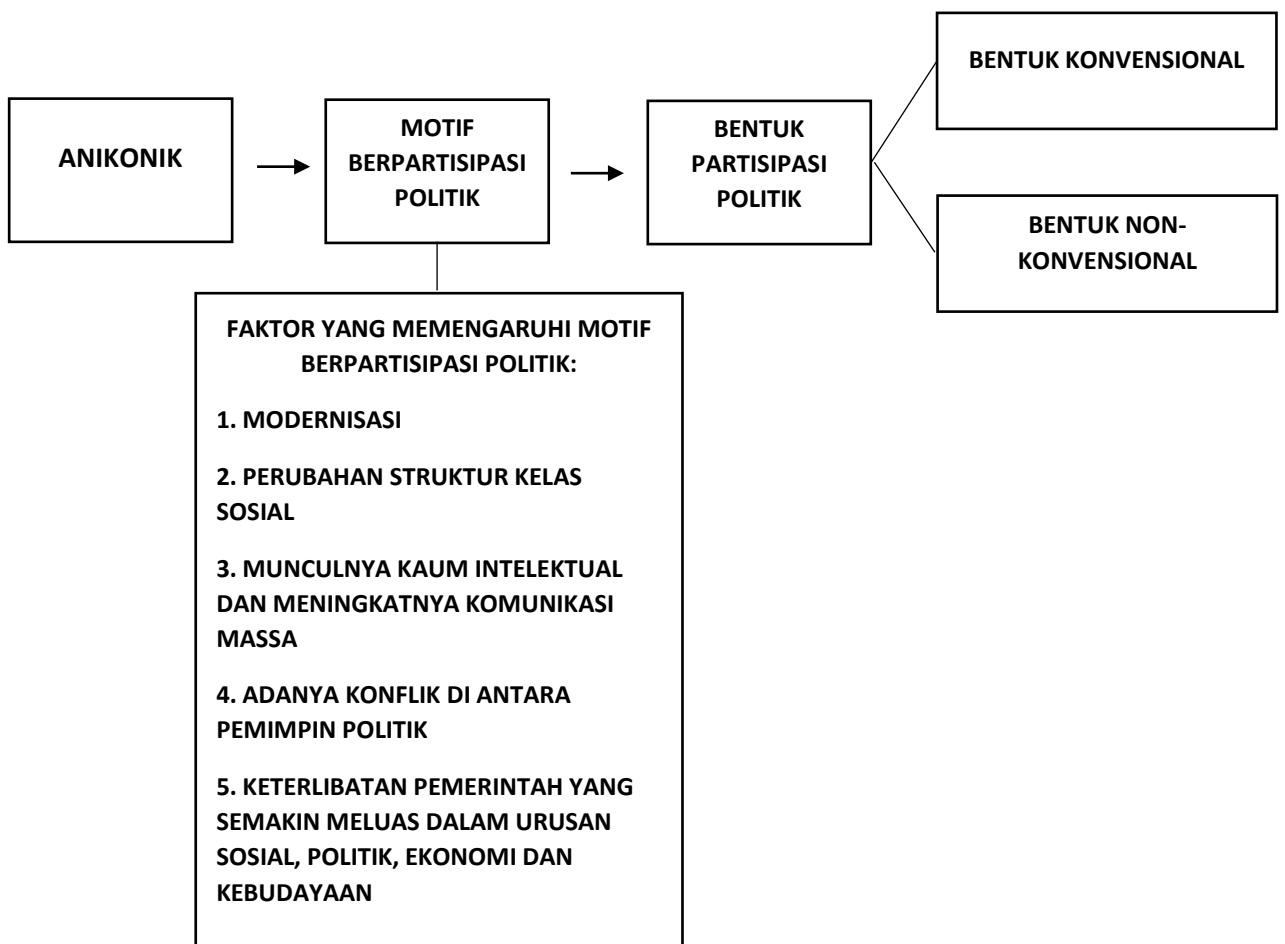
2. Perubahan struktur kelas sosial;
3. Munculnya kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa;
4. Adanya konflik antara pemimpin politik, dan;
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Faktor-faktor di atas yang memengaruhi motif sampai kebutuhan apa yang perlu warga negara sampaikan lewat partisipasinya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, terkait pemenuhan motif - tujuannya, seseorang baik secara individu maupun kelompok dapat berpartisipasi politik dalam berbagai bentuk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gabriel Almond bahwa partisipasi politik memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, dalam hal ini seperti pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi, dan;
2. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (*violence*) dan revolusioner, dalam hal ini seperti pengajuan petisi, berdemonstrasi/unjuk rasa, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, tindak kekerasan politik terhadap manusia dan perang gerilya (Budiardjo, 2015).

Melalui penjabaran di atas tentang partisipasi politik dan mengaitkannya dengan penelitian ini, Anikonik sebagai kelompok (warga) dari proses politik. Sehingga penelitian ini berupaya untuk meneliti bagaimana motif serta faktor-faktor yang memengaruhi motifnya serta bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok musik tersebut. Untuk menyederhanakannya ke dalam bentuk sebuah skema, dapat dilihat skema kerangka konseptual sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.A. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini, fenomena sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna (Sugiyono, 2010). Menurut Taylor dan Bogdan, metode ini menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2013).

Metode ini meneliti suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

3.B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu	Keterangan
23 Februari 2022	Wawancara dengan informan pertama, (<i>Amok</i>)
8 Mei 2022	Wawancara dengan informan kedua (<i>Goza</i>)
15 Mei 2022	Wawancara dengan informan ketiga, (<i>Oci</i>)
13 Juni 2022	Wawancara dengan informan keempat, (<i>Ade</i>)